

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak negara di dunia menghadapi isu yang berkaitan dengan keberadaan kaum minoritas. Baik di negara maju maupun dinegara berkembang, isu minoritas semakin merebak dengan adanya berita –berita di media cetak dan elektronika. Hal ini menjadi suatu masalah yang penting untuk diperdebatkan antara penguasa dan petinggi negara. Seharusnya, perdebatan untuk menyelesaikan masalah minoritas justru dengan kebijakan-kebijakannya, malahan menjadikan masalah minoritas semakin berlarut-larut. Kejadian ini dialami oleh masyarakat minoritas di Moro Philipina, Aborigin di Australia dan Pattani di Thailand bagian Selatan

Dinegara-negara maju telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak azasi manusia dan sebagian besar yang menjadi korban adalah kelompok minoritas. Issue yang dihadapi negara-negara tersebut sebetulnya saat ini dipertentangkan oleh banyak negara, walaupun banyak negara telah menyadari pentingnya arti persamaan hak dan derajat sesamanya

Tak terkecuali seperti yang dialami oleh minoritas muslim yang berada di Thailand Selatan khususnya Pattani. Islam memang bukan merupakan agama mayoritas penduduk Thailand, namun rasanya tidak adil jika pemerintah Thailand memberikan perlakuan tidak adil terhadapnya. Faktanya permasalahan minoritas

muslim di Thailand. bagian selatan merupakan masalah minoritas yang paling kompleks dan lama dibandingkan dengan masalah minoritas lainnya.

Fenomena ini telah berlangsung lama yaitu sejak aneksasi Raja Rama V pada tahun 1902.¹ Sekitar 80% dari 6 juta penduduk Muslim Thailand, banyak terkonsentrasi di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Stun. Jumlah penduduk muslim yang 6 juta jiwa merupakan 9.2% dari jumlah keseluruhan warga Thailand yaitu 62 juta jiwa.² Dari sisi geopolitik Thailand Selatan mempunyai letak yang sangat strategis yaitu berbatasan dengan Malaysia dan terletak dimulut selat Malaka, karena itu wilayah ini dijadikan markas bajak laut, mafia narkoba dan pasar senjata gelap Indochina.

Di Thailand bagian selatan, kekerasan yang terjadi hampir setiap hari telah mengganggu tiga dari empat provinsi mayoritas muslim, semua berada dekat perbatasan dengan Malaysia. Menurut data lebih dari 600 orang tewas sejak Januari 2004 akibat kekerasan, pemerintah menuduh bahwa hal ini disebabkan oleh orang yang berbeda faham dan kaum separatis Islam.

Ensiklopedi tematis dunia Islam menyebutkan pada abad 16 Pattani sudah dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam terpenting di semenanjung Malayu. Para ahli sejarah memperkirakan Islam telah masuk ke Pattani sejak abad 10 atau 11. Agama ini datang lewat jalur perdagangan, Pattani dikenal dengan nama Langkasuka dan tempat pertama dimana Islam berkembang adalah Patthalung. Sejak saat itu lalu lintas pertukaran ulama berlangsung antara Pattani, Pasai,

¹ Munso Salae, *Faii Thi Rue Da Jub*, Southern Muslim Publication, 2004, p. 16-17 di *The Role of Civil in the Prevention of Armed Conflict*

² Kompas Online, *Thailand Selatan dalam Geostrategi*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0411/13/In/1383359.htm>, diakses tanggal 5 Desember 2005

Melayu, bahkan kemudian sampai ke Kalimantan dan Sulawesi. Raja Phya Tu Nakpa yang sebelumnya beragama Budha, akhirnya memeluk Islam setelah sakitnya yang berlarut-larut itu berhasil disembuhkan oleh Syekh Said Bersisa, seorang ulama yang berasal dari Pasai.

Catatan sejarah menunjukkan pada masa jayanya Pattani bukan saja menguasai wilayah semenanjung Melayu melainkan juga sempat mengalahkan Kerajaan Siam. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1563 saat Pattani di bawah kekuasaan Sultan Muzzafar Syah. Bersama adiknya Mansyur Syah ia menaklukkan Siam yang lemah karena telah beberapa kali digempur tentara Burma. Masa keemasan Pattani hanya berlangsung selama 67 tahun. Sejak tahun 1651, kekuasaan Pattani berangsur menyusut akibat rebutan kekuasaan internal. Namun begitu, Siam tetap saja memerlukan waktu seabad lebih untuk dapat menaklukkan Pattani. Sampai akhirnya Pattani benar-benar jatuh ketangan Siam pada tahun 1785.

Karena kerajaan Pattani ditundukkan kerajaan Siam melalui sebuah peperangan, maka dengan sendirinya bentuk hubungan kerajaan Thailand dengan rakyat di bekas kerajaan Pattani tidak beda dengan kekuasaan penjajah atas rakyat yang dijajah. Hak-hak rakyat di negeri jajahan diabaikan. Lowongan kerja di pemerintahan hanya terbuka untuk pegawai rendahan. Sedangkan pembangunan social dan ekonomi hanya sekedarnya saja menyentuh daerah ini. Pendidikan, misalnya, jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain di Thailand. Sedangkan industri tidak satupun dibangun disini, kecuali beberapa yang bergerak di subsektor perikanan. Itu pun dalam skala menengah.

Sejak saat itu, hubungan antara Siam (sekarang menjadi Thailand sejak Juni 1939) Pattani mulai memanas, oleh karena konflik yang terus-menerus terjadi. Perjuangan panjang yang dilakukan oleh kaum muslim mengalami pasang surut. Pernah diantaranya menyatakan ingin bergabung dengan Indonesia, sayangnya pihak Indonesia saat itu sedang bergelut dengan persoalan internal yaitu baru saja menyatakan kemerdekaannya. Aspirasi kaum Muslim Pattani terabaikan.

Ekspresi kekecewaan sebenarnya sudah mulai diperlihatkan pada tahun 1970-an sampai awal 1980-an. Gerakan pemberontakan muncul di tiga provinsi di selatan, Pattani, Songkla, dan Yala, sebagai protes terhadap pembangunan yang timpang.

Pemberontakan di Thailand selatan sebenarnya sudah mulai muncul lagi ke permukaan pada akhir 2001. Namun, baru pada Januari 2004, pemerintah Bangkok mengakui bahwa generasi baru kaum pembangkang memang sudah lahir. Semua orang baru menyadari bahwa telah tumbuh separatisme dalam wajah baru, sejak terjadinya serangan dan perampokan senjata dalam jumlah besar di sebuah markas tentara, 4 Januari 2004. Pemerintah tidak bisa lagi membantah, serangan-serangan itu telah dilancarkan oleh kaum separatisme dan bermotif politik.

Puncaknya adalah tragedi Tak Bai di Thailand Selatan yang diawali oleh bobolnya gudang senjata milik militer di wilayah Narathiwat. Sebanyak 370 pucuk senjata hilang dan diduga oleh pemerintah pelakunya adalah mafia narkoba. Issu itu berubah menjadi isu etnik ketika pemerintah Thaksin menangkap enam guru Muslim yang diduga berperan sebagai otak pelaku

pembobolan gudang senjata milik militer. Kondisi ini diperparah dengan aksi unjukrasa menuntut dibebaskannya 6 saudara mereka yang ditahan karena tuduhan mencuri senjata. Pasukan Militer Thailand membubarkan demonstrasi yang berujung dengan tewasnya enam orang. Selanjutnya, lebih dari seribu orang kemudian ditangkap dan ditahan dan tujuh puluh delapan orang meninggal dalam perjalanan dari Tak Bai menuju kamp militer. Mereka meninggal karena kehabisan oksigen selama dalam perjalanan menggunakan truk militer yang penuh sesak. Mereka ditumpuk-tumpuk dalam truk seperti binatang, padahal mereka semua sedang menjalankan ibadah puasa.

Dalam setahun, usaha kampanye perang melawan obat terlarang tahun 2003, sudah mengakibatkan kematian lebih dari 2.500 orang.³ Dan sebagian besar dari mereka tewas ditembak di daerah selatan.

Gerakan pemberontakan sempat surut, tetapi kemudian muncul lagi awal tahun 2004. Sedikitnya 440 orang tewas selama 10 bulan terakhir, tahun 2004.⁴ Sangat terasa, pergolakan meningkat drastis. Tragedi Tak Bai yang merenggut 85 nyawa itu hanya menambah runyam keadaan. Karena gelombang balas dendam akan terus terjadi. Nyaris setiap hari terjadi ledakan bom dan pembunuhan umat Buddha sebagai pembalasan atas tewasnya warga Muslim.⁵ Dalam seminggu pasca tragedy itu saja, aksi balas dendam oleh kaum militan Muslim sudah memakan korban tewas sebanyak 15 orang, dan kesemuanya merupakan orang

³ Pikiran Rakyat, *Thailand Terjerumus ke Dalam Ketidakpastian*, <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/042006/07/0907.htm>, diakses tanggal 16 Juni 2006

⁴ Kompas, 29 Oktober 2004

⁵ Kompas, 7 November 2004

Thai-Buddhis.⁶ Menurut informasi dari harian Kompas terbitan 17 Februari 2005, sejak awal Januari tahun lalu kekerasan di selatan telah memakan korban sebanyak 650 orang, sedangkan pada harian Kompas terbitan 25 Februari 2005, akumulasi jumlah korban tewas berubah menjadi 670 orang. Itu berarti, dalam sepekan saja sudah ada 20 orang lagi yang meninggal. Jika jumlah itu digunakan sebagai patokan, maka tidak dapat kita bayangkan berapa orang yang telah menjadi korban aksi-aksi kekerasan oleh gerakan separatis di Thailand selatan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka problematika yang dikemukakan adalah: **“mengapa aksi-aksi kekerasan oleh gerakan separatis Pattani cenderung meningkat dalam masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra?”**

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penyebab dari terus meningkatnya aksi-aksi kekerasan oleh gerakan separatis Pattani pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh kaum minoritas Muslim Pattani dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

⁶ Kompas, 6 November 2004

3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Srata 1 pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Konflik

James E. Dougherty⁷ menyatakan bahwa, konflik manusia adalah konflik sederhana berupa dorongan-dorongan untuk terus hidup yang saling bersaing. Konflik tersebut adalah konflik dimana setiap manusia atau kelompok berusaha membentengi kekuasaan dan prestise nya terhadap bahaya, ekspresi kekuasaan dan kebangsaan yang bersaing oleh karena justru pemilikan kekuasaan dan prestise pihak lain, maka konflik ini pada hakikatnya merupakan konflik yang sulit dan keras daripada sekedar kompetisi antara berbagai dorongan-dorongan untuk kelangsungan hidup di dalam alam.

Menurut pendapat James E. Dougherty ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa suatu konflik terjadi karena timbulnya suatu perasaan yang dialami oleh manusia dalam suatu suku sebagai akibat adanya persaingan-persaingan dengan suku lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidup serta untuk mempertahankan kelangsungan hidup sukunya sendiri. Persaingan-persaingan ini pada akhirnya juga menyangkut pada kebutuhan-kebutuhan non materi, seperti halnya kebutuhan dalam bidang politik, social dan budaya. Dimana,

⁷ James E. Dougherty dan Robert L. Pflatzgraff Jr, *Beberapa Teori Hubungan Internasional*. Diklat terjemahan oleh M. Amin Rais, Fisipol UGM, Jakarta, 1983, hal 28

persaingan-persaingan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan non materi tersebut selalu diikuti atau berpeluang besar menyebabkan konflik berdarah antara dua suku ataupun antara beberapa suku yang terlibat.

Dari pendapat James E. Dougherty ini maka penyebab konflik di Thailand Selatan khususnya di Propinsi Pattani adalah adanya persaingan antara dua etnis (Thai-Buddhis dan Melayu Muslim) yang mengakibatkan kecemburuan. Yaitu karena pemerintah Thailand merasa bahwa yang merupakan etnis asli Thailand adalah etnis Thai-Buddhis, sedangkan Melayu Muslim hanya merupakan minoritas yang selalu terpinggirkan dalam hal kesejahteraan hidup dan pendidikan serta kesehatan. Mereka juga melalui perjuangan-perjuangan yang cukup sengit dalam melawan Kebijakan Asimilasi yang dibuat oleh pemerintah Thailand. Kesenjangan-kesenjangan yang dibuat oleh pemerintah Thailand telah membuat kaum Pattani yang notabene merupakan Melayu Muslim, menjadi semakin merasa berbeda dengan etnis Thai-Buddhis. Bahkan dapat dihitung berapa jumlah kaum Pattani yang pada akhirnya dapat menduduki jabatan penting dalam pemerintahan Thailand.

Sedangkan menurut Dahrendorf⁸, adanya distribusi wewenang yang tidak merata dalam suatu masyarakat juga menimbulkan adanya konflik. Perbedaan-perbedaan dalam posisi-posisi social mengakibatkan kepentingan-kepentingan antagonistic diantara mereka yang bersangkutan. Pihak yang sedang berwenang, dalam hal ini adalah Thaksin, mempunyai *ruling interest* yang berlainan dari kepentingan pihak yang dikuasai, dalam hal ini adalah

⁸ K.J. Veeger, *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat Dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*, Jakarta, Gramedia, 1985, hal. 216

minoritas Muslim Pattani. Pihak yang berwenang berkepentingan dengan ketahanan dan kelestarian status quo atau susunan social yang telah memberi kedudukan tinggi kepada mereka. Jadi mereka akan cenderung untuk membela dan mempertahankan status mereka itu. Sebaliknya, pihak yang dikuasai selalu akan merasa tertekan dan terkekang oleh status quo itu, sehingga mereka cenderung menginginkan perubahan dan bahkan perombakan.

Dari teori konflik diatas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa konflik di Pattani Thailand selatan terjadi karena adanya sikap antagonis dari Perdana Menteri Thaksin. Beliau selalu merasa bahwa apa-apa yang telah menjadi kebijakannya merupakan suatu hal yang paling baik bagi seluruh masyarakat Thailand. Padahal dari awal sudah sangat jelas, bahwa Muslim Pattani itu mempunyai perbedaan agama dan budaya yang sangat kentara dengan Thailand yang Buddhis. Tetapi dalam prakteknya, Thaksin selalu saja menutup mata dengan perbedaan-perbedaan itu. Dan justru menggunakan wewenangnya untuk menekan masyarakat dengan kekerasan, sehingga semakin membuat lebar jarak antara Bangkok dan Muslim Pattani di selatan.

2. Konsep Separatisme

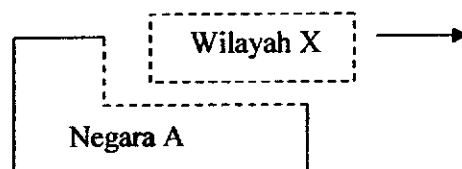
Kebanyakan dari sekitar 170 negara bangsa memiliki sejumlah besar penduduk minoritas. Meskipun sudah berasimilasi cukup lama dengan kelompok-kelompok penduduk lainnya, banyak kelompok minoritas yang masih merasa terpisah dan berbeda. Perbedaan ini berkembang menjadi gerakan separatis dengan dilontarkannya tuntutan formal pemisahan wilayah

untuk membentuk sebuah Negara tersendiri atau tidak jauh dari bentuk ekstrim ini, sebatas otonomi bebas dari pengaturan Negara induk. Tuntutan-tuntutan separatis ini biasanya ditolak oleh pemerintah pusat karena tuntutan itu mengancam integritas politik dan wilayahnya.⁹

Gejala separatisme digambarkan sebagai berikut:

Gambar I

Model Separatis. Wilayah X melepaskan diri dari Negara A untuk membentuk Negara baru X



Sumber: Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 2*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993

Wilayah X menginginkan melepaskan diri dari Negara A sebagai bentuk separatisme. Begitu juga minoritas Muslim Pattani yang berada di Propinsi Thailand Selatan ingin memisahkan dari kekuasaan Thailand untuk membentuk negara yang merdeka. Aksi-aksi yang dilakukan oleh minoritas Muslim Pattani adalah karena kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang berangsur menekan kaum muslim sebagai ancaman terhadap pemerintah dan mengancam keutuhan etnis.

Berbicara separatisme, banyak ahli yang mendefinisikannya sebagai keinginan suatu kelompok untuk memisahkan diri dari kelompok pusat yang

⁹ Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional 2*, Jakarta: Gramedia, 1992, hal. 182

biasanya timbul dari rasa ketidakpuasan yang berkepanjangan atas kondisi subordinasi dari pemerintah pusat.

Allan Buchanan mengemukakan bahwa ada tiga alasan yang mendorong timbulnya separatisme.¹⁰ **Pertama**, peninjauan kembali (*recticatory justice*), **kedua**, pembagian yang tidak merata (*discriminatory redistribution*), dan **ketiga**, alasan perlindungan kebudayaan (*cultural self-presevation*). Alasan pertama secara sederhana menyatakan seseorang mempunyai bukti secara histories atas wilayah tersebut. Dahulu, Pattani merupakan sebuah kerajaan yang meliputi seluruh daerah Thailand selatan dan berbatasan dengan Kelantan, Kedah, Perak, dan Perlis. Pada abad ke 16, Pattani sudah dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam terpenting di semenanjung Melayu, dimana Pattani lebih dikenal sebagai Kerajaan Pattani Raya. Pattani juga pernah mengalahkan Kerajaan Siam pada tahun 1563. Alasan kedua yang paling sering terjadi yaitu adanya kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif atau menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lain. Pemerintah Thailand memperlakukan orang-orang Melayu Muslim Pattani hanya sebagai warga negara kelas dua, yang artinya, dalam hal pendistribusian hak-hak sebagai sesama warga negara Thailand, mereka berada di posisi kedua. Dalam hal pekerjaan misalnya, jika dalam suatu kesempatan ada sebuah lowongan pada suatu perusahaan di Bangkok, maka orang-orang dalam perusahaan itu akan cenderung memilih pelamar yang merupakan orang Thai-Buddhis daripada harus memilih Melayu Muslim Pattani. Dalam hal industri misalnya,

¹⁰ Allen Buchanan, "Self Determination and The Right to Secede", dalam *Journal of International Affairs*, Vol.42 no.2 winter 1992, New York: School of International and Public Affairs, Columbia University, p.353-357

banyak perusahaan-perusahaan besar yang dibangun di pusat kota Bangkok, akan tetapi tidak satupun yang dibangun di daerah selatan, walaupun ada itupun hanya merupakan industri yang berada dalam skala menengah saja. Alasan perlindungan budaya berasal dari keinginan memelihara budaya, tradisi, agama, dan bahasa dari dominasi etnis mayoritas. Dalam hal ini, sudah terlihat jelas tentang adanya perbedaan budaya antara Thai-Buddhis dan Melayu Muslim Pattani. Adanya program asimilasi kebudayaan yang dipaksakan, misalnya: adanya keharusan untuk membungkuk guna menghormati patung-patung Buddha, padahal dalam ajaran Islam menghormati patung sama saja dengan menghormati berhala, dan itu termasuk perbuatan yang musyrik. Adanya keharusan untuk berbahasa Thailand bagi seluruh warga negara Thailand tanpa terkecuali, padahal orang-orang Pattani mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Melayu. Keinginan untuk tetap mempertahankan budaya Melayu yang merupakan identitas mereka itulah yang ikut memupuk subur kebencian Muslim Pattani terhadap pemerintah. Munculnya banyak gerakan separatisme, yang notabene sudah berskala nasional dan internasional juga ikut membakar semangat mereka untuk melanjutkan perjuangan separatisnya. Gerakan-gerakan separatis itu banyak yang berasal dari daerah Malaysia, yang merupakan saudara serumpun bagi orang-orang Pattani. Asistensi jaringan Islam Internasional di daerah Thailand selatan yang mempunyai tujuan sama, yaitu memperjuangkan Islam, juga berperan dalam rangka memberikan dukungan moral dan materiil bagi perjuangan Pattani.

Keinginan kaum separatisme untuk memisahkan diri akan semakin kuat apabila identitas etnis terkombinasi dengan keyakinan *self determination*. Akibatnya kaum separatis lebih memilih berdiri sendiri, karena hal itu akan memberi kebebasan bagi mereka untuk mengurus masalah-masalahnya sendiri tanpa campur tangan dari kelompok lain.

3. Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik dibutuhkan oleh suatu negara yang ingin menjadi negara demokratis. Oleh karenanya partisipasi yang meluas akan mengarah pada pelaksanaan demokrasi yang ideal. Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila tingkat partisipasinya tinggi. Partisipasi politik menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson dalam buku *No Easy Choice Political Participation In Developing Countries* didefinisikan sebagai kegiatan warga negara secara individual yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.¹¹

Sampai beberapa waktu yang lalu, hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau untuk menduduki jabatan pemerintahan telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan terpandang.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik terbagi menjadi dua macam, yakni: **Pertama**, bentuk "konvensional" yaitu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. **Kedua**, bentuk "non-konvensional" yaitu

¹¹ Samuel P. Huntington dan Joan Nelson, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Alih bahasa: Sahat Simamora, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hal.6

termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi) maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Dan di bawah ini tabel yang menunjukkan macam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan berbagai waktu.¹²

Tabel 1

Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
Pemberian suara (voting)	Pengajuan petisi
Diskusi politik	Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye	Konfrontasi
Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan	Mogok
Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)
	Tindak kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
	Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Gabriel A. Almond, *Perbandingan Sistem Politik*, Editor: Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal 45-47

Melihat bentuk bentuk partisipasi politik diatas maka salah satu bentuk partisipasi politik yang sesuai dengan partisipasi politik Muslim Pattani adalah partisipasi politik non konvensional.

Kaum Pattani pun pernah melakukan partisipasi politik dalam bentuk konvensional, akan tetapi pemerintah pusat Thailand tidak pernah memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi orang selatan, terutama Kaum Pattani. Karena itulah, kaum Pattani kemudian cenderung menggunakan partisipasi politik dalam bentuk yang non konvensional, karena dengan

¹² Gabriel A. Almond, *Perbandingan Sistem Politik*, Editor: Mohtar Mas'oe'd dan Colin Mac Andrews, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1997, hal 45-47

menempuh cara itu, mereka dapat menyuarakan aspirasi mereka dan berharap agar pemerintah pusat juga dapat mendengarkan apa yang mereka teriakkan dan perjuangkan.

E. Hipotesa

Dari uraian permasalahan dan analisa diatas, pada kasus minoritas Muslim Pattani ini, yang menyebabkan terus meningkatnya aksi-aksi kekerasan oleh gerakan separatis Pattani pada masa pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra adalah disebabkan oleh:

1. Faktor Internal, yaitu : adanya kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang bersifat diskriminatif di bidang politik, ekonomi, social-politik dan hukum.
2. Faktor Eksternal, yaitu : asistensi jaringan Islam Internasional di wilayah Thailand Selatan.

F. Metodologi Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan mahasiswa Pattani yang tergabung dalam PEMIPTI dan sedang menyelesaikan studi mereka di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Adapun data yang digali bersumber dari berbagai literature: buku-buku, jurnal, publikasi, majalah, koran-koran, laporan tahunan, maupun internet.

G. Jangkauan Penulisan

Fokus utama dari penulisan ini adalah pemerintahan Thailand di bawah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Berupa pendahuluan, yang terdiri dari:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Kerangka Dasar Teori
- E. Hipotesa
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penulisan.

BAB II : Minoritas Muslim Pattani di Thailand Selatan

- A. Terbentuknya Minoritas Muslim Pattani
- B. Munculnya Gerakan Separatis Pattani
- C. Macam-macam Gerakan Separatis di Pattani Thailand Selatan
 - 1. Barisan Nasional Pembebasan Patani (BNPP)
 - 2. Barisan Revolusi Nasional (BRN)
 - 3. GAMPAR (Gabungan Melayu Pattani Raya)
 - 4. Pertubohan Persatuan Pembibasan Pattani (PPPP) atau PULO (Pattani United Liberation Organization)
 - 5. Black December

6. Gerakan Mujahidin Islam Pattani (GMIP)
7. The United Front for The Independence of Pattani

BAB III : Dinamika perjuangan kaum minoritas Muslim Pattani di Thailand Selatan

A. Partisipasi Politik Konvensional

1. Kampanye Teror Untuk Menginternasionalisasikan Issue
2. Partisipasi Dalam Partai Politik

B. Partisipasi Politik Non-Konvensional

1. Demonstrasi
2. Mogok / Boikot
3. Tindak Kekerasan Politik Terhadap Harta Benda
4. Tindak Kekerasan Politik Terhadap Manusia
5. Konfrontasi/Perlawanan Bersenjata

BAB IV : Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kekerasan di Pattani Thailand Selatan

A. Kebijakan-kebijakan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra

1. Kebijakan-kebijakan Politik
 - 1.1 Pembubaran Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC)
 - 1.2 Pembubaran Civil Police Military Joint Headquarter (CPM 43)
 - 1.3 Southern Border Provinces Peace – Building Program (SBPPBP)

1.4 CEO (Chief Executive Officer) Government Program

2. Kebijakan-kebijakan Ekonomi

2.1 Penjualan 49,6 % Saham Perusahaan Telekomunikasi
Shin Corporation Yang Bebas Pajak

2.2 Kebijakan Ekonomi

2.3 Pendirian Anti Money Laundering Office (AMLO)

3. Kebijakan-kebijakan Sosial-Politik

3.1 Kebijakan Penutupan Pondok

3.2 Pemerintahan Partai Tunggal Perdana Menteri Thaksin
Shinawatra

4. Kebijakan Hukum

Martial Law

B. Asistensi Jaringan Islam Internasional di Pattani Thailand Selatan

1. Sumber Dana Bagi Kelompok Garis Keras

2. Pasokan Senjata Bagi Kelompok Garis Keras

3. Pelatihan Militer Bagi Kelompok Garis Keras

4. Penangkapan Beberapa Tokoh Jaringan Islam Internasional

BAB V : Bab Penutup

Kesimpulan